

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tersirat amanat bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berperan sebagai pelayan masyarakat, dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Peranan dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil sangat penting dan menentukan karena pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional saat ini adalah bagaimana menghasilkan sumber daya manusia yang potensial dan produktif menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan memiliki semangat kerja, disiplin, serta etos kerja yang tinggi.

Salah satu indikator dari keberhasilan seorang pemimpin adalah pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan merupakan salah satu kegiatan yang selalu dijumpai dalam organisasi. Namun, seringkali keputusan yang diambil tidak berdampak efektif terhadap kinerja pegawai. Hal tersebut disebabkan oleh seringnya pengambilan keputusan hanya didasarkan kepada

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

pendapat dan pertimbangan pimpinan dibanding berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Pengambilan keputusan pun mempunyai arti penting bagi maju mundurnya suatu organisasi, terutama karena masa depan suatu organisasi ditentukan oleh pengambilan keputusan<sup>2</sup>. Pengambilan keputusan ini merupakan tugas penting bagi seorang pemimpin. Baik buruknya seseorang menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin pada hakekatnya dinilai dari keputusan-keputusan yang diambilnya. Pemimpin dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan organisasinya. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap tujuan, kegiatan, kebijaksanaan, dan alat-alat yang digunakan oleh organisasi.

Pengambilan keputusan diperlukan untuk mengarahkan, membina, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugasnya agar dapat meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja pegawai harus terus dilaksanakan agar para pegawai memiliki kesungguhan dalam bekerja guna menunjang iklim kerja yang baik. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan guna mencapai tujuan organisasi, untuk itu para pegawai harus dapat meningkatkan kinerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi akan tercapai.

Peran pemimpin dalam berbagai aktivitas dan tujuan yang dicapai, terutama dalam pengambilan keputusan sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukan oleh bawahannya. Pimpinan dalam hal pengambilan keputusan harus

---

<sup>2</sup> Salusu, 2003, *Pengambilan Keputusan Strategik*, Jakarta, PT. Grasindo, hlm. 45

mampu memberikan bimbingan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan, serta mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah, yang merupakan bagian dari pelaksana pembangunan Provinsi Jawa Barat, yang lahir guna membantu pelaksanaan otonomi daerah, Satpol PP ini bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2010 Pasal 4, yaitu bertugas untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melaksanakan perlindungan masyarakat. Dengan adanya tugas yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut semua aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk mampu melaksanakan tugas secara maksimal bagi masyarakat.

Secara umum paparan tersebut sebagai penelitian awal penulis dalam konsep pengaruh pengambilan keputusan, yang terjadi titik pokok dalam penelitian ini secara khusus lebih disesuaikan dengan permasalahan pengaruh pengambilan keputusan yang terjadi pada objek penelitian, yaitu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan, dalam hal ini Kepala Satuan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, yang mempunyai wewenang formal yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dengan menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dimasa yang akan datang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, mengindikasikan adanya permasalahan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dan kinerja pegawai di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Penempatan pegawai merupakan keputusan dari Kasat pol pp. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini secara langsung berakibat pada kurangnya kualitas cara pengerjaan tugas-tugas selanjutnya.

**Tabel 1.1**  
**Daftar penempatan pegawai di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Provinsi Jawa Barat**

<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Latar Belakang Pendidikan</b>	<b>Jabatan</b>
6	SMA (Fisika)	Pelaksana Seksi Pembinaan
3	STM (Mesin)	Pelaksana Subbagian Umum dan Kepegawaian
2	STM (Elektro)	Pelaksana Subbagian Umum dan Kepegawaian
14	SMP	Pelaksana Seksi Keamanan dan Ketertiban
8	SD	Pelaksana Seksi Keamanan dan Ketertiban

*Sumber : Rekapitulasi PNS 2013*

2. Masih adanya keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Contoh pada penyusunan kegiatan administrasi perkantoran yang masih mengalami keterlambatan. Seharusnya laporan dapat diselesaikan dalam waktu 1:30 menit tetapi realisasinya laporan dapat diselesaikan dalam waktu 2:30 menit.

3. Berdasarkan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tahun 2013 disebutkan bahwa hasil capaian kinerja pegawai mengenai kualitas SATPOL PP dan PPNS Prov. Jabar dan kuantitas SATPOL PP sesuai dengan rasio ideal jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat telah dicapai dengan tingkat capaian kelompok sebesar 95% dan 30,95%. Padahal seharusnya target yang harus dipenuhi adalah 100% akan tetapi realisasinya hanya tercapai sebesar 95% dan 30,95%.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kinerja pegawai yang dipengaruhi oleh pengambilan keputusan dari pimpinan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul :

**“Pengaruh Pengambilan Keputusan Pimpinan terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Penempatan pegawai merupakan keputusan dari Kepala Satuan Pol PP. Namun terkadang penempatan posisi karyawan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Hal tersebut secara langsung akan berakibat pada menurunnya kualitas kerja pegawai. Contohnya : Pada bidang Sumber Daya Aparatur (SDA) terdapat seorang lulusan SMA jurusan fisika yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan PPNS. Sudah tentu dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki akan

kesulitan dalam melaksanakan tugas yang diberikan yang pada akhirnya kualitas kerja tidak akan tercapai.

2. Kepala satuan di dalam melaksanakan pengambilan keputusan mengenai evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, kurang mengetahui hakikat dari masalah yang dihadapi, dengan kata lain belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi atau mengetahui cara penyelesaian tugas yang dihadapi oleh para pegawai dengan setepat-tepatnya, yang disebabkan karena kesibukan pimpinan sehingga jarang berada ditempat, yang mengakibatkan para pegawai didalam melaksanakan tugasnya masih saja mengalami keterlambatan.
3. Kepala satuan didalam menilai hasil kerja serta mengevaluasi, masih kurang mampu untuk mengadakan tindak lanjut atau perbaikan. Contohnya :pimpinan kurang memperhatikan terhadap hasil kerja pegawai. Capaian kinerja pegawai mengenai kualitas SATPOL PP dan PPNS Prov. Jabar dan kuantitas SATPOL PP sesuai dengan rasio ideal jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat telah dicapai dengan tingkat capaian kelompok sebesar 95% dan 30,95% Padahal seharusnya target yang harus dipenuhi adalah 100% akan tetapi realisasinya hanya tercapai sebesar 95% dan 30,95%.

### **1.3 Rumusan Penelitian**

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh keadaan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat?
2. Seberapa besar pengaruh informasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat?
3. Seberapa besar pengaruh kemampuan yang dimiliki oleh seorang pimpinan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat?
4. Seberapa besar pengaruh kondisi, informasi, serta sikap yang dimiliki oleh seorang pimpinan secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memperoleh data tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dengan tujuan utama sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besaran pengaruh keadaan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
2. Untuk mengetahui besaran pengaruh informasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
3. Untuk mengetahui besaran pengaruh kemampuan yang dimiliki oleh seorang pimpinan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;

4. Untuk mengetahui besaran pengaruh keadaan, informasi, serta kemampuan secara simultan terhadap kualitas kerja kinerja pegawai pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep atau teori-teori tentang ilmu Administrasi Negara khususnya yang terkait dengan pengambilan keputusan serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan kepustakaan mengenai pengambilan keputusan dan kinerja pegawai.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah, terutama dalam menganalisis permasalahan yang terjadi yang ada kaitannya dengan ilmu yang didapat dalam perkuliahan.
2. Bagi lembaga hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu Administrasi Negara.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi instansi yang terkait untuk dijadikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.



## 1.6 Kerangka Pemikiran

Peneliti memerlukan suatu kerangka pemikiran sebagai landasan teori dalam memecahkan masalah yang telah dikemukakan, yaitu berupa pendapat para ahli atau pakar yang dijadikan titik tolak atau landasan teoritis dalam pembahasan masalah yang akan dibahas.

Ibnu Syamsi mengemukakan pendapatnya tentang pengambilan keputusan, yaitu tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya melalui pemilihan satu diantara alternatif-alternatif yang dimungkinkan.<sup>3</sup>

Sedangkan Pengertian kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>4</sup>

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti mempunyai gambaran bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, harus ada suatu kebijakan, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala satuan. Pengambilan keputusan tersebut diantaranya dapat berupa pengambilan keputusan mengenai evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan adanya keputusan tersebut diharapkan dapat meningkatkan

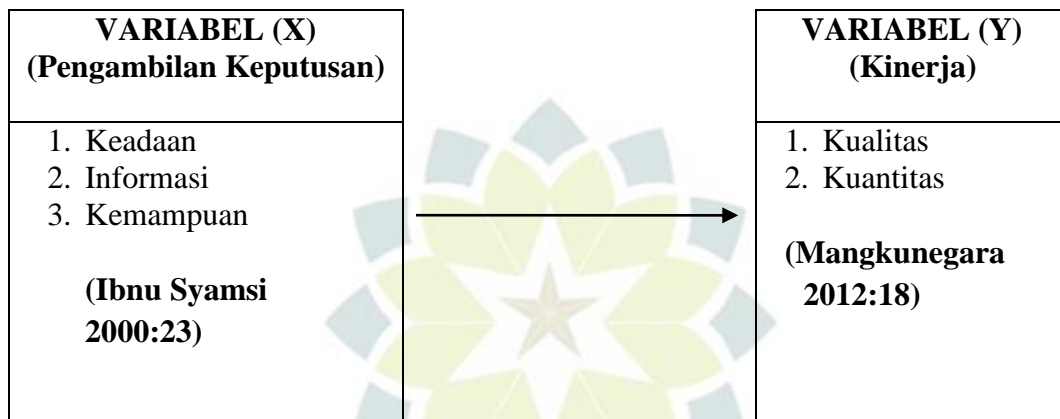
---

<sup>3</sup> Ibnu Syamsi, 2000, *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*, Jakarta, PT. Bumi aksara, hlm. 5

<sup>4</sup>Anwar Prabu Mangkunegara, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 67

kinerja pegawai. Oleh karena itu berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dalam suatu organisasi tergantung pada proses pengambilan keputusan.

**Gambar 1.1.**  
**Paradigma Penelitian**



### 1.7 Hipotesis

Atas dasar kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis asosiatif penelitian, yakni :

$H_0$  : tidak dapat pengaruh pengambilan keputusan pimpinan terhadap kinerja pegawai di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

$H_a$  : terdapat pengaruh pengambilan keputusan pimpinan terhadap kinerja pegawai di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.